

PERBANDINGAN POLITIK  
DALAM KONTEKS TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK:  
POTRET INDONESIA DALAM MASA GLOBALISASI <sup>1</sup>

<Teuku Rezasyah>

[Jurusan Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran]

I

PENDAHULUAN

Saat ini kita semua berada dalam posisi sulit. Reformasi yang berkembang sejak tahun 1997 belum berhasil membawa bangsa Indonesia pada kehidupan yang lebih baik. Walaupun demikian, kita semua harus berfikir positif, bahwa dengan kerja keras pemerintah dan masyarakat luas, kita dapat membawa bangsa ini pada kehidupan yang lebih baik.

Secara teori, sebuah peningkatan kinerja hendaknya mengakar pada semua kekuatan yang hidup dalam masyarakat, baik pada tingkatan pemerintah maupun masyarakat (Appelbaum, 1970: 88). Mengikuti struktur masyarakat Indonesia yang sangat parokhial (mengharapkan tuntunan dari pemerintah), maka tanggung jawab terbesar terletak ditangan pemerintah.

Secara Perbandingan Politik, apakah logika diatas dapat diterima?. Mengingat kedudukan Indonesia adalah sebagai negara sedang berkembang, maka potret perbandingan yang ideal hendaknya merujuk pada pengalaman serupa yang pernah dialami oleh sesama negara berkembang, ataupun negara yang telah melewati status ini (Gray, 1988: 71).

Ada baiknya kita mengamati pemikiran yang dikemukakan Perdana Menteri Singapura, dimana tidak ada sistem politik di dunia ini yang lebih baik maupun lebih buruk. Yang hendaknya disikapi adalah kemampuan

---

<sup>1</sup> Disampaikan sebagai Materi Ajar dalam Mata Kuliah Perbandingan Sistem Politik, dihadapan Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara ke-43 TP 2006. Kegiatan berlangsung pada tanggal 9 Mei 2006 di Lembang.

sistem tersebut mencapai tugas pokoknya. Penjelasan ini dikemukakan dalam Harian The Straits Times tanggal 25 April 2006, yang selanjutnya disarikan oleh Harian Kompas sebagai berikut: 'Sistem politik disini sama adilnya dengan yang Anda bisa temukan di banyak negara lain, dalam hal bagaimana Anda harus bisa: a Tampil; b) Memiliki Pandangan; c) Bisa Mengorganisasi; d) Memobilisasi; dan dan e) Menggugah Keikutsertaan. Untuk semua ini, tidak membutuhkan banyak uang atau kekuasaan untuk bisa menggerakkannya' (Harian Kompas, 26 April 2006. Hal. 10).

Dari gambaran diatas, terlihat sebuah pesan bahwa pemerintah dimanapun harus mampu bekerja keras melibatkan peran serta masyarakat dalam semua program pembangunan, dan menjadikan mereka sebagai subjek dalam pembangunan, dan bukannya objek pembangunan. Untuk konteks Indonesia pad masa Otonomi Daerah saat ini, maka aktor-aktor lainnya yang diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah adalah kalangan pendidikan, dan dunia usaha, mengingat mereka adalah agen pembangunan, dan mampu menggunakan logika dalam keseharian mereka. Koordinasi empat aktor diatas menurut hemat kami, dapat mempercepat terselenggaranya sebuah *good governance* (tata pemerintahan yang baik) di Indonesia, baik pada tingkatan nasional maupun daerah.

Bagaimanakah kita dapat mengoptimalkan aparatur, mengembangkan potensi daerah, serta mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik tersebut? Dalam naskah ini, kami akan menjawabnya melalui pembabakan berikut ini. Kesatu, penggambaran situasi saat kita terlibat penuh dalam globalisasi, yakni mulai saat ini hingga tahun 2020 mendatang. Kedua, menyusun sebuah matriks interaksi antar aktor. Ketiga, mengenali kendala-kendala dalam sinergi. Keempat, mengenali sumbangan semua aktor dalam sebuah sinergi. Kelima, pengajuan sebuah kode etik bersama, sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Keenam, Keterhubungan Good Governance dengan diplomasi. Ketujuh, Saran Tindak bagi pemerintah pemerintah dan rakyat Indonesia.

## II

### MASALAH BERSAMA DALAM GLOBALISASI

Kita tidak dapat menolak globalisasi, karena globalisasi sudah tiba, dan setiap harinya bergerak disekitar kita. Kesatu, pemilik modal dapat mengalihkan modal mereka ke luar negeri, karena disana lebih menguntungkan, dan disini membingungkan. Kedua, banyak produk daerah kita yang sudah dipatenkan di luar negeri, dan dikenal sebagai produk negara lain, sementara kita hanya bangga dengan produk itu sebagai kekayaan budaya semata. Ketiga, kita mau tak mau harus membayar lisensi atas perangkat lunak yang kita gunakan sehari-hari. Keempat, nasib pekerja kita dan juga pekerja asing di wilayah kita dapat memaksa negara lain memberlakukan aturan-aturan yang merugikan kita, seperti kritik atas hak azazi manusia, pembatasan bantuan, dan pemberlakuan larangan mengunjungi Indonesia. Kelima, kita sudah tak mampu lagi mengenal komponen yang kita gunakan dalam sebuah produksi, mengingat tidak terbatasnya integrasi komponen yang kita gunakan.

Dengan menggunakan kriteria yang berlaku di kalangan negara ASEAN, dapat dibuat sebuah klasifikasi yang berlaku umum, dengan berakar pada indikator politik, ekonomi, dan sosial budaya (Roxborough, 1988: 22). Untuk keperluan naskah ini dibuat kedalam sebuah urutan sebagai berikut.

1. Terbatasnya anggaran negara guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan.
2. Terbatasnya investasi dari dalam dan luar negeri, sehingga menghambat perputaran ekonomi di daerah, serta meniadakan produktivitas masyarakat.
3. Serbuan tenaga kerja asing secara besar-besaran, yang menguasai teknologi dan manajemen modern, sehingga sangat mengurangi kesempatan kerja penduduk setempat, serta menimbulkan kerawanan-kerawanan baru.

4. Meluasnya pengangguran kalangan kurang terdidik, sehingga menciptakan pembangkangan umum, dan pengurusan dana pembangunan guna memberdayakan mereka.
5. Menurunnya kualitas hidup masyarakat umum, akibat meluasnya industri secara tidak terkendali, yang sayangnya tidak didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat umum.

### III

#### SEBUAH SINERGI: MUDAH DIKATAKAN, NAMUN SULIT DILAKSANAKAN

Apakah tujuan sebuah sinergi?. Menurut hemat kami, tujuan sinergi adalah: a) saling menguntungkan para aktor yang terlibat yakni pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum; b) mendukung semua potensi yang dimiliki para pelaku sinergi sehingga menyatukan mereka dalam sebuah koalisi guna mempertahankan kepentingan bersama, dan c) memaksimalkan sumber daya alam dan kekayaan budaya yang ada di daerah.

Dalam matriks berikut ini akan kita perhatikan bersama potensi yang dimiliki keempat aktor tersebut diatas.

AKTOR	TUJUAN UTAMA	TARGET KEBERHASIL AN	KEKUATAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	1. Pencapaian tujuan nasional. 2. Pencapaian tujuan daerah.	1. Perlindungan masyarakat. 2. Kesejahter aan umum. 3. Kecerdasan	1. Memiliki sumber informasi dan dukungan keuangan.

		masyarakat.	2. Wewenang mengelola daerah.
LEMBAGA PENDIDIKAN	1. Pendidikan. 2. Pengajaran. 3. Penelitian. 4. Pengabdian masyarakat	1. Lulusan siap pakai. 2. Kurikulum tepat guna. 3. Terus memberikan nilai tambah dalam perkembangan nasional.	1. Memiliki pakar, mahasiswa, fasilitas pendidikan. 2. Mampu melaksanakan program sesuai kebutuhan daerah. 3. Netral dalam pembangunan.
DUNIA USAHA	1. Laba. 2. Produktivitas sesuai bidang usaha.	1. Terus berkembang saat resesi.	1. Memiliki basis teknologi dan manajemen. 2. Mengetahui akses pasar dan permodalan. 3. Memiliki informasi dunia kerja.
MASYARAKAT LUAS	1. Kebutuhan dasar terpenuhi. 2. Berperan aktif dalam pembangunan.	1. Bertahan walau saat resesi.	1. Jumlah yang besar, dengan potensi yang masih dapat dikembangkan.

IV  
KENDALA-KENDALA  
DALAM SINERGI SELAMA INI

**PERENCANAAN:**

1. Tidak terintegrasi.
2. Berjalan sendiri-sendiri.
3. Kurang memerhatikan kekhasan dan potensi daerah.
4. Belum terfokus pada pemberdayaan masyarakat daerah.
5. Belum berwawasan lingkungan.
6. Belum mengembangkan program-program yang berkelanjutan.

**PELAKSANAAN**

1. Berbenturan.
2. Tumpang tindih.
3. Penyebaran informasi terbatas.
4. Saling tidak mengetahui.
5. Sulit dilaksanakan sesuai jadwal.
6. Terganggu kendala modal dan manajemen.
7. Terbebani masalah-masalah *ad hoc* yang membingungkan.

**EVALUASI**

1. Belum adanya standar kinerja yang disepakati bersama.
2. Standar kinerja yang mudah dibantah oleh berbagai kalangan pada tingkat nasional dan internasional.

V  
SUMBANGAN SEMUA AKTOR  
BAGI SEBUAH SINERGI YANG OPTIMAL

LEMBAGA PENDIDIKAN

1. Mampu mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja dalam berbagai bidang, sesuai dengan spesifikasi daerah.
2. Mampu melakukan pendampingan staf dalam menangani berbagai masalah manajemen dan teknis.
3. Mampu membantu pembangunan wilayah melalui mekanisme Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai wilayah.
4. Mampu menyiapkan tenaga kerja mulai tingkat pemagangan, tenaga paruh waktu, dan tenaga tetap.
5. Mampu memberikan jasa konsultasi guna pengembangan program.
6. Memiliki anggaran yang memadai.

PEMERINTAH DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

1. Memiliki anggaran yang sangat besar.
2. Mampu menyebarkan informasi atas kegiatan pelayanan masyarakat, guna didukung oleh dunia usaha dan lembaga pendidikan.
3. Mampu menyiapkan pusat-pusat pelatihan yang berorientasi kerja, dan dapat dioperasikan bersama.
4. Mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi berusaha.

DUNIA USAHA

1. Mampu menyediakan informasi tentang perkembangan dunia usaha dan tenaga kerja.
2. Mampu memberikan informasi tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja saat ini dan masa mendatang.
3. Mampu menyiapkan modal guna pendirian fasilitas laboratorium guna dioperasikan bersama.
4. Mampu memberikan informasi dagang yang strategis, seperti asal-usul sumber daya alam dan teknologi yang digunakan, serta upaya memperoleh sumber alternatif di daerah.
5. Mampu mendukung ekonomi daerah, dan membatasi ketergantungan pemerintah pada sumber-sumber di luar daerah.

VI  
KONSEPSI UNTUK INDONESIA

Berdasarkan prinsip-prinsip 'Good Corporate Governance' (tata pemerintahan yang baik), sebenarnya kita dapat menyusun sebuah kerangka etika politik yang terukur, guna dikembangkan dikalangan elite pemerintah, dunia usaha, kalangan pendidikan, dan masyarakat luas. Dalam praktiknya, prinsip GCG tersebut tidak kita terapkan secara mutlak, mengingat kita memiliki kedaulatan untuk menerapkan aturan yang harus sesuai dengan hukum positif Indonesia (UNDP, 2001: 23). Berikut ini kami kemukakan sekumpulan etika, yang dapat dijadikan renungan oleh kalangan DPR dan pemerintah, demi terciptanya hubungan kelembagaan yang lebih baik. Adapun penjabaran dari etika tersebut adalah sebagai berikut.

KODE ETIK UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH,  
DUNIA USAHA, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

PRINSIP DASAR	PENJABARAN
1 PARTISIPASI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempercepat pengambilan keputusan atas masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, tanpa perlu menunggu himbauan dari masyarakat.</li><li>2. Secara teratur melakukan konsultasi, guna secara optimal dapat mengevaluasi tingkat pembangunan yang telah dicapai, serta mengantisipasi kemungkinan timbulnya kendala dalam penanganan pembangunan.</li><li>3. Seoptimal mungkin melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.</li></ol>



<p style="text-align: center;">2 PENEGAKAN HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama menjunjung tinggi tegaknya hukum nasional, menghargai hukum dan norma internasional, meniadakna diskriminasi dalam praktik kenegaraan, serta mendukung atas hak azazi manusia yang sesuai dengan hukum obyektif yang berlaku di Indonesia, serta sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.</li> <li>2. Menindak langsung aparat yang menyalahgunakan wewenang dalam tugas mereka.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">3 KETERBUKAAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sikap saling percaya dalam hubungan antar pejabat yang bekerja, melalui pertukaran informasi dan pemberian informasi yang memadai, serta memudahkan akses guna memperoleh informasi yang akurat.</li> <li>2. Secara teratur menyampaikan pada masyarakat luas hasil-hasil pencapaian mereka dalam bidang-bidang yang diprioritaskan, dan menjadi kepentingan umum.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">4 BERTANGGUNG JAWAB</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertinggi kinerja penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan hak-hak yang dilindungi Undang-Undang, sehingga tanggap atas segala keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat.</li> <li>2. Secara teratur melakukan koordinasi kebijakan pada tingkatan makro dan mikro, dan menjadikan masukan dari masyarakat sebagai perkuatan kinerja.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">5 PERSAMAAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan peluang yang sama kepada seluruh warga negara/masyarakat tanpa kecuali, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dan menyediakan perlindungan hukum yang setara.</li> <li>2. Mempermudah perijinan hingga pelaksanaan investasi asing di Indonesia, yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu memberdayakan masyarakat luas di Indonesia.</li> </ol>

<p style="text-align: center;">6 VISI STRATEGIS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan strategi pembangunan yang tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk jangka panjang, dengan seoptimal mungkin menggunakan potensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.</li> <li>2. Melaksanakan pembangunan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dengan sebanyak mungkin menggunakan sumber dana dari dalam negeri, dan sumber dana dari luar negeri yang tidak merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang .</li> </ol>
---	---

<p style="text-align: center;">7 TEPAT GUNA DAN BERHASIL GUNA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempermudah investasi asing yang benar-benar memberdayakan masyarakat luas di Indonesia.</li> <li>2. Menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya dengan penggunaan seluruh sumber daya secara optimal dan bijak.</li> <li>3. Memprioritaskan pembangunan pada daerah terpencil, guna memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, yang hasilnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat umum.</li> </ol>
---	---

<p style="text-align: center;">8 PROFESIONAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berusaha keras meningkatkan kemampuan, keahlian, dan moral para penyelenggara negara sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dapat diandalkan.</li> <li>2. Menjamin bahwa peningkatan kinerja penyelenggaraan negara akan secara bertahap mengikuti standar yang berlaku di negara-negara maju, dan mampu menggunakan sumber dana nasional yang terbatas secara optimal.</li> </ol>
--	---

<p style="text-align: center;">9 AKUNTABILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja keras, sehingga memberi kesempatan/peluang pada masyarakat guna mengetahui prosedur yang diterapkan bagi terciptanya sebuah kebijakan.</li> <li>2. Mengundang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pemikiran mereka, demi terciptanya kebijakan yang lebih handal dan berdaya jangkau kedepan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">10 PENGAWASAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan yang ketat atas administrasi publik, dan melakukan pembinaan secara teruji dan tepat guna, dengan melibatkan kalangan masyarakat.</li> <li>2. Menjamin akan memberikan informasi yang memadai demi terciptanya pengawasan masyarakat yang adil, benar, dan tidak memihak</li> </ol>

## VI

### KETERHUBUNGAN GOOD GOVERNANCE DENGAN DIPLOMASI

1. Politik luar negeri adalah kelanjutan dari politik nasional, dikondisikan agar mampu berinteraksi dengan lingkungan internasional.
2. Dalam pencapaiannya, dibutuhkan kinerja yang tinggi dari birokrasi nasional, yang didukung oleh seluruh masyarakatnya, agar kepentingan nasional dapat tercapai.
3. Dalam praktik diplomasi, dibutuhkan prinsip-prinsip kesetiaan pada konstitusi negara dan ideologi negara, Hukum Internasional, dan kemampuan mengoptimalkan sumber daya internasional yang terbatas bagi terpenuhinya kepentingan nasional.
4. Diplomasi dilaksanakan secara konsisten, lintas birokrasi, lintas generasi, didukung oleh sumber daya ekonomi yang memadai, serta sumber manusia yang idealis dan memiliki kinerja tinggi.

5. Diplomasi akan berhasil jika kita memiliki penguasaan intelektual yang tinggi atas negara sasaran, serta mampu berinteraksi dengan mitra dialog pada tataran nasional, daerah, dunia usaha, dan individu.
6. Diplomasi membutuhkan keanggotaan aktif dan kemampuan mempengaruhi pergerakan berbagai organisasi internasional dan organisasi regional.
7. Jika diplomasi tidak berhasil mencapai kepentingan nasional, maka peranan TNI akan semakin menentukan. Karena itu, perangkat diplomasi yang ideal hendaknya mampu mengintegrasikan kebutuhan TNI.

**PRAKTIK KEPENTINGAN NASIONAL DAN  
SASARAN POLITIK LUAR NEGERI**

TUJUAN NASIONAL- 1	IDEALISME	DILEMA DIPLOMASI
MELINDUNGI SEGENAP TUMPAH DARAH DAN BANGSA INDONESIA	1. TNI MEMILIKI ANGGARAN YANG MEMADAI SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS POKOK SECARA OPTIMAL.  2. TNI MAMPU BEKERJASAMA DENGAN RAKYAT GUNA MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PRAKTIK TERORISME.  3. PEMERINTAH MAMPU BERTINDAK TEGAS	1. DAPATKAH KONDISI KEUANGAN NEGARA MEWADAHAI KEPENTINGAN TERSEBUT?.  2. APAKAH KITA MEMILIKI KREDIBILITAS GUNA MEMPEROLEH KEBUTUHAN TERSEBUT?.  3. DAPATKAH 'GCG' YANG KITA PRAKTIKKAN DI INDONESIA MEMENUHI KRITERIA NEGARA MAJU?.  4. APAKAH SUMBER

	<p>DALAM HAL TERJADINYA PELANGGARAN WILAYAH DARAT, LAUT, DAN UDARA OLEH PIHAK MANAPUN.</p> <p>4. TERHINDARNYA BANGSA DARI KONFLIK HORIZONTAL DAN VERTIKAL.</p> <p>5. TERLINDUNGINYA KEKAYAAN NASIONAL DARI ANCAMAN 'ILLEGAL LOGGING', 'ILLEGAL FISHING', DAN 'ILLEGAL MINING'.</p>	<p>KEUANGAN INTERNASIONAL DAPAT MEWADAHI KEBUTUHAN ALUTSISTA INDONESIA?.</p> <p>5. DAPATKAH KITA MEMPEROLEH JAMINAN INTERNASIONAL GUNA MENGAKUI KEDAULATAN DAN INTEGRITAS NASIONAL?.</p> <p>6. MAMPUKAH KITA MENEKAN MEREKA (NEGARA,DUNIA USAHA) YANG MENCURI DI PERAIRAN NASIONAL?.</p>
--	--	--

TUJUAN NASIONA L-2	IDEALISME	DILEMA DIPLOMASI
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM	<p>1. TERSEDIANYA SEMBILAN BAHAN POKOK (SEMPAKO) DALAM KUALITAS YANG BAIK DAN HARGA YANG TERJANGKAU.</p> <p>2. TERSEDIANYA TEKNOLOGI TINGGI DAN TEPAT GUNA BAGI INDUSTRI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PERKEBUNAN.</p>	<p>1. MENGAPA KITA SULIT MENGHADAPI PENYELUNDUPAN YANG JELAS-JELAS MENGHANCURKAN EKONOMI NASIONAL?.</p> <p>2. DAPATKAH KITA MEMPEROLEH LISENSI ATAS TEKNOLOGI YANG DIBUTUHKAN?.</p> <p>3. MENGAPA KITA</p>

	<p>3. TERSEDIANYA PUPUK SECARA MEMADAI, DENGAN KUALITAS YANG BAIK DAN HARGA YANG TERJANGKAU, BERIKUT DISTRIBUSINYA.</p> <p>4. TERSEDIANYA FASILITAS KREDIT YANG KOMPETITIF, SEHINGGA MEMUDAHKAN KEGIATAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH (UKM).</p> <p>5. TERSALURKANNYA PAJAK SECARA ADIL BAGI PROYEK PEMBANGUNAN PADAT KARYA YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MADYA.</p> <p>6. PENINDAKAN TEGAS ATAS PELAKU NARKOBA, PENJAHAT EKONOMI.</p>	<p>GAGAL MENCEGAH EKSPOR ILEGAL?.</p> <p>4. MENGAPA KITA BELUM BERHASIL MEMPEROLEH KREDIT LUNAK DARI DUNIA USAHA TIMUR TENGAH YANG SEHARUSNYA MENDUKUNG UPAYA PEMBERDAYAAN UMAT?.</p> <p>5. DAPATKAH KEBIJAKAN PAJAK DAN TEKNOLOGI MADYA MENJADI CONTOH GCG KITA YANG BAIK?.</p> <p>6. MENGAPA KITA GAGAL MENARIK PULANG PARA PENJAHAT EKONOMI TERSEBUT?.</p>
--	--	---

TUJUAN NASIONAL-3	IDEALISME	DILEMA DIPLOMASI
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA	<p>1. MENINGKATNYA ANGGARAN PENDIDIKAN SEHINGGA MENDUKUNG PROSES BELAJAR MENGAJAR SECARA BAIK MULAI TINGKAT SD HINGGA SMA.</p>	<p>1. MENGAPA BANK DUNIA BELUM OPTIMAL MEMBANTU DI SEKTOR INI?.</p> <p>2. DAPATKAH KITA</p>

	<p>2. TERSEDIANYA FASILITAS BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA DENGAN FASILITAS YANG SIAP PAKAI, PARA PENGAJAR YANG MEMAHAMI INTERAKSI ANTARA BISNIS, TEKNOLOGI, DAN PERTUMBUHAN.</p> <p>3. TERSELENGGARANYA PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN, YANG DIDUKUNG KETERSEDIAAN BUKU AJAR DAN PRAKTIK AJAR SECARA GRATIS.</p> <p>4. MEWAJIBKAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK MENYAMPAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN TEPAT GUNA DAN PROGRAM LUAR SEKOLAH PADA SORE DAN MALAM HARI.</p>	<p>MENDAPATKAN 'TRAINING OF TRAINERS' DARI NEGARA DONOR SEHINGGA SECARA ALAMIAH TERCIPTA ALIH TEKNOLOGI?.</p>
--	--	---

TUJUAN NASIONAL-4	IDEALISME	DILEMA DIPLOMASI
TURUT MEMELIHARA PERDAMAIAN DUNIA	<p>1. BERSIKAP TEGAS ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KEDAULATAN DAN HAK AZAZI MANUSIA DI SELURUH DUNIA.</p> <p>2. MENDUKUNG PRAKARSA PERSERIKATAN BANGSA-</p>	<p>1. TIDAK/ KURANG BERANI MELAWAN KEBIJAKAN ADI KUASA.</p> <p>2. SIKAP KERAS</p>

	BANGSA (PBB) DALAM MENYELESAIKAN KRISIS INTERNASIONAL.	HANYA SEBATAS RESOLUSI.
	3. MENOLAK PELIBATAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM KRISIS YANG TERJADI DI LUAR INDONESIA.	3. SULIT MEMONITOR WARGA NEGARA INDONESIA DI DALAM DAN LUAR NEGERI.

## VII SARAN TINDAK

1. Kredibilitas dalam negeri sangat menentukan saat kita melakukan diplomasi dengan negara maju, dan juga negara berkembang, demi terpenuhinya kepentingan nasional yang membutuhkan dukungan internasional. Ajuan pemikiran: Adanya kepastian hukum di dalam negeri.
2. Diperlukan pemahaman yang mendalam atas negara-negara asing, termasuk kemampuan kita menjalin kontak-kontak ekonomi, bisnis, sosial budaya dengan berbagai kalangan mereka. Ajuan pemikiran: pendirian 'Indonesian Lobbies' di luar negeri; Indonesian Trade Office; Indonesian Cultural Centre.
3. Perlunya kita mengkomunikasikan tingkat pembangunan yang kita capai selama ini pada kalangan luar negeri, guna menaikkan citra pemerintah dan rakyat Indonesia. Ajuan pemikiran: Indonesian International Radio and Television; Asia-Africa Network News.



## KEPUSTAKAAN

Appelbaum, Richard P. 1970. Theories of Social Change. USA: Rand McNally College Publishing Company.

Gray, J. 1988. 'Contemporary Issues in East Asia'. Dalam Pacione, Michael. The Geography of the Third World

Kompas. 2006. 'Lee Hsien Loong: Sistem Politik Kami Sama Adilnya'. 26 April. Halaman 10.

Roxborough, Ian. 1988. Theories of Underdevelopment. London: Macmillan Education.

UNDP. 2001. Indonesian Human Development Report. Jakarta: UNDP.